

PNS – PENGHASILAN - TAMBAHAN  
2025

PERWAL KOTA LANGSA NO.31, BD KOTA LANGSA 2025 / NO 1150, 17 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.17 Tahun 2020; PP No.94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Qanun Kota Langsa No.10 Tahun 2016; Qanun Kota Langsa No.8 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa No.1 Tahun 2023.
  - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi pratama, tunjangan jabatan administrasi dan tunjangan jabatan fungsional. Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP. Besaran persentase TPP pegawai berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP pegawai provinsi atau kabupaten/kota. Tim pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pemerintah daerah dapat memberikan TPP setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kota Langsa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Pembayaran TPP pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*) maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2025.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:  
Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 889) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 960) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 1016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.